

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG ASLIH FUNGSI LAHAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI

(Farhan Firdiansyah)

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kotak Pos 1296

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Semarang. Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Semarang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menganalisis dampak yang terjadi dari implementasi kebijakan pembangunan, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembangunan dan persepsi masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari kebijakan pembangunan tersebut. Peneliti memilih Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang sebagai studi kasus penelitian. Dimana akan diukur dampak yang terjadi dari implementasi kebijakan terhadap konversi lahan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani serta mengetahui persepsi masyarakat tentang implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan alat penelitian wawancara dengan informan penelitian adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dan Pihak lain yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta menyebarkan kuisioner kepada masyarakat dan dianalisis menggunakan skala likert serta menguji pengaruh dengan analisis Chi-Square. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Daerah terkait serta sumber kepustakaan lain seperti buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih kurang baik dari segi pengawasan. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya angka konversi lahan pertanian yang terjadi karena pengawasan yang kurang intensif. Selain itu dari hasil penelitian dari masyarakat bahwa konversi lahan yang dilakukan oleh pemilik lahan dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta kebutuhan akan lahan rumah bagi masyarakat dari adanya pertumbuhan penduduk. Dari hal tersebut memperlihatkan angka kesejahteraan petani yang menurun melalui penghitungan Nilai Tukar Petani. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperketat pengawasan guna tercapainya implementasi yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Persepsi Masyarakat, Konversi Lahan, Kesejahteraan Petani

ANALYSIS OF THE IMPACT AND PUBLIC PERCEPTION ON LAND CONVERSION POLICY TOWARDS FARMERS' WELFARE

(Farhan Firdiansyah)

Departement of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences,
Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Poctal code: 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The aim of this study is to examine the implementation of Spatial Plan Policy in Semarang. The development policy in Semarang is created to increase the people's welfare. This study analyzes the impact of the implementation of the development policy and also tries to find out the impact for the public and the public perception towards the policy. In order to find the impact of the implementation of policies on land conversion that affect the farmers' welfare and also to know the public perception about the policies, researchers chose Banyukuning Village, Bandungan, Semarang as a case study.

The method used in this study is a combination of quantitative and qualitative approach with descriptive method. To obtain the data, researchers interviewed Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, and other party related to the implementation of the development policy. The data are also obtained by giving questionnaire to the public and analyzed the result of it using Likert scale and test the influence using Chi- Square. Researchers also uses secondary data which come from related Regional Regulations as well as other literary sources such as books and journals.

The results show that the implementation of the policy is bad in terms of its control and supervision. It is proved by the high number of agricultural land conversion cases that occur caused by less control. The other result also shows that land conversion done by the landowners to increase their standard of living as well as the need of home land as the impact of the population growth. From this results, it can be inferred that the farmers' welfare is decreased due to the decrease of the production caused by land conversion. The government should be more active to control the implementation of the policies in order to avoid such things happen in the future.

Keywords: Policy implementation, Public perception, land conversion, farmers' welfare

A. PENDAHULUAN

Kebijakan penataan ruang dan wilayah adalah salah satu kebijakan yang disusun guna dapat mengelola daerah dengan memanfaatkan potensi daerah yang tersedia guna meningkatkan kondisi daerah baik dari segi infrastruktur, ekonomi maupun social. Penataan ruang dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan kondisi lingkungan dengan baik namun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Dalam pencapaian sebuah kebijakan dibutuhkan suatu proses implementasi yang baik sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kabupaten Semarang adalah salah satu daerah yang memiliki permasalahan cukup besar dalam implementasi kebijakan penataan ruang dan wilayah. Sebagai salah satu daerah yang memiliki luas wilayah pertanian cukup besar menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Semarang dalam mempertahankan lahan pertanian yang ada guna mendukung keberlanjutan kondisi lingkungan yang seimbang. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Semarang sendiri yang ditujukan sebagai daerah penyangga Kota Semarang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah adalah tuntutan pembangunan yang dapat menyangga Kota Semarang dalam berbagai sektor khususnya infrastuktur.

Selain tantangan tersebut, masalah lain yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Semarang adalah pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Kabupaten Semarang yang memicu kebutuhan lahan perumahan bagi masyarakat. Selain lahan bagi perumahan, tantangan lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat Kabupaten Semarang. Secara khusus yakni Kecamatan Bandungan yang memiliki lokasi yang ditunjuk dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011 Kabupaten Semarang Tentang Rencana

Tata Ruang dan Wilayah sebagai daerah penyangga (Resapan Air) Kawasan yang ada dibawahnya.

Kebutuhan lahan bagi perumahan serta tuntutan ekonomi yang semakin meningkat mendorong para petani pemilik lahan pertanian untuk mengkonversi lahannya menjadi lahan non-pertanian. Dalam kurun waktu mulai tahun 2011-2014 terjadi konversi lahan pertanian sebanyak 28,27 Ha yang dikonversi menjadi rumah dan bangunan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan berat bagi pemerintah Kabupaten Semarang dalam proses implementasi kebijakan penataan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI

B.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa pemikiran teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka sebagai instrument analisis, yaitu:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. faktor faktor tersebut digunakan guna mengukur keberhasilan sebuah kebijakan dalam proses implementasi. Adapun beberapa faktor yang dimaksud antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.

b. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat yang dimaksud adalah respon dari masyarakat terhadap sebuah permasalahan terkait kebijakan. adapun beberapa indicator yang digunakan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat tentang kebijakan yang ada antara lain Kognisi, Afeksi serta Evaluasi. Intrumen ini digunakan untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat akan proses implementasi kebijakan serta dampaknya bagi masyarakat yang menjadi target kebijaka tersebut.

B.2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kombinasi antara metode kualitatif serta kuantif. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis proses implementasi dari pihak pemerintah yang menjadi policy implementor. Sedangkan metode kuantitaif digunakan untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan penataan ruang dan wilayah Kabupaten Semarang khususnya masyarakat Desa Banyukuning, Bandungan. Penelitan disini berfokus pada bagaimana proses implementasi serta dampak yang terjadi

dari adanya kebijakan penataan ruang serta melihat bagaimana persepsi masyarakat sebagai target kebijakan dalam menilai proses implementasi kebijakan.

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, kuisioner dan studi pustaka/dokumen. Dalam langkah wawancara peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten Semarang dalam proses implementasi kebijakan serta memberikan kuisioner kepada masyarakat sebagai target kebijakan tersebut. Peneliti juga mencari informasi pelengkap terkait penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Bandungan melalui internet maupun studi pustaka menggunakan dokumen/arsip pemerintah yang terkait dengan kebijakan penataan ruang.

Teknik analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis temuan yang didapatkan peneliti dilapangan. Selain itu juga peneliti melakukan pengujian chi-square guna melihat adanya pengaruh antara persepsi masyarakat terhadap konversi lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Bandungan Khususnya Desa Banyukuning.

C. PEMBAHASAN

C.1 Implementasi Kebijakan Tata Ruang dan Wilayah

Menurut Edward implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi. Faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Diantara faktor yang mempengaruhi sebuah proses implementasi antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka penulis menggunakan teori Edward III guna melihat proses implementasi kebijakan penataan ruang dan wilayah yang berdasarkan Perda Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031.

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan wilayah Kabupaten Semarang, instansi yang berkaitan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PU serta SKPD terkait lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Semarang. Dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang, maka unsur utama yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan kebijakan tersebut serta mensosialisasikan dalam hal peruntukan lahan.

Dalam hal sosialisasi kebijakan, dinas yang memiliki tugas untuk melaksanakan adalah Dinas Pekerjaan Umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PU adalah dengan terjun langsung ke tingkat kecamatan, penyediaan website yang berisi informasi mengenai rencana tata ruang serta penyediaan alat peraga guna menjadi sumber informasi alternative bagi masyarakat. Dalam hal sosialisasi yang dilakukan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap tingkat pengetahuan masyarakat mengenai adanya sosialisasi kebijakan penataan ruang dan wilayah yakni sebanyak 82% responden menyatakan setuju dengan adanya sosialisasi kebijakan tersebut.

2. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya, khususnya yang berkaitan dengan anggaran pembangunan masih kurang memadai untuk mendukung proses pembangunan yang ditetapkan dalam kebijakan penataan ruang dan wilayah Kabupaten Semarang. Dari permasalahan tersebut menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Semarang untuk dapat melakukan pembangunan secara maksimal. Defisit anggaran yang selalu terjadi masih menjadi permasalahan cukup sulit bagi pemerintah. Hal tersebut juga dinyatakan oleh salah satu pemerintah Desa yang menjadi obyek penelitian yakni Desa Banyukuning, bahwa anggaran yang didapat dari pemerintah daerah masih kurang mencukupi untuk melakukan pembangunan di tingkat desa itu sendiri.

Selain permasalahan sumber daya terkait anggaran, permasalahan yang dihadapi oleh Pemda adalah minimnya sumber daya manusia yang memadai. Hal tersebut memicu pemetaan pemanfaatan lahan yang kurang maksimal sehingga hambatan dalam pendapatan APBD terhambat karna permasalahan sulitnya investasi yang masuk. Investor kesulitan mendapatkan lahan yang sesuai dengan harapan investor. Sehingga pembangunan yang terjadi masih bersifat sentralistik dan tidak merata.

3. Disposisi

Unsur disposisi ini berkaitan dengan komitmen dari pelaksana kebijakan. berdasarkan pernyataan yang disampaikan dari para pelaksana kebijakan penataan ruang dan wilayah memang telah menyatakan komitmennya dengan baik.

Namun jika melihat realitas yang ada memang pada dasarnya, komitmen yang disampaikan belum sesuai dengan keadaan di lapangan. Pengawasan yang masih cenderung kurang terhadap setiap penggunaan lahan serta peruntukan lahan yang

tidak sesuai dengan peruntukannya menjadi salah satu bentuk penataan ruang belum berjalan dengan maksimal. Tingginya angka konversi lahan yang terjadi di Kecamatan Bandungan sebanyak 28,06 Ha lahan pertanian telah dikonversikan menjadi lahan non-pertanian.

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, sebanyak 22,82 Ha lahan pertanian di Desa Banyukuning dialih fungsikan peruntukannya untuk lahan non-pertanian seperti rumah dan bangunan seluas 22,76 Ha. Angka tersebut cukup tinggi melihat perbandingan jumlah konversi lahan yang ada di Kecamatan Bandungan. Lemahnya pengawasan dalam hal perijinan menjadi kendala yang mempengaruhi terhadap tingkat konversi lahan pertanian.

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal struktur birokrasi tentu berkaitan dengan koordinasi. Untuk pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan wilayah, Pemkab Semarang telah melakukan proses koordinasi dalam menyusun perencanaan penataan ruang dan wilayah. Perencanaan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta SKPD lainnya melalui musrenbang dan musrenbangdes.

Namun disisi lain minimnya sumber daya yang memadai memicu pengawasan serta proses pelaksanaan masih jauh dari kata maksimal. Lemahnya pengawasan terkait permasalahan perijinan berkaitan dengan sumber daya manusia yang masih kurang memadai dalam mendukung pengawasan proses implementasi

C.2 Persepsi Masyarakat

Menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu. Persepsi tersebut dibagi menjadi tiga tahap yakni kognisi (Internal) untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, afeksi (Eksternal) untuk mengukur sikap atau kepentingan yang ada dimasyarakat dalam merespon permasalahan kebijakan penataan ruang, serta evaluasi (Eksternal) untuk melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya implementasi kebijakan penataan ruang.

1. Faktor Internal

a. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebijakan

Dalam tahap kognisi yang mengukur tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan terkait penataan ruang dan wilayah peneliti melihat bahwa masyarakat menyatakan sudah mengetahui tentang adanya kebijakan penataan

ruang dan wilayah berdasarkan Perda Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011. Namun yang menjadi masalah ialah hampir sebagian masyarakat menyatakan tidak mengetahui tentang Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang Perda Pengelolaan Kawasan Lindung sebanyak 62,5% responden menyatakan tidak mengetahui terkait Perda tentang pengelolaan kawasan lindung.

Permasalahan mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Perda Pengelolaan kawasan lindung menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya laju konversi lahan di Desa Banyukuning. Hal tersebut dibuktikan dari hal uji chi-square antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan kawasan lindung dengan laju konversi lahan yakni dengan hasil sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan adanya pengaruh antara tingkat pengetahuan masyarakat terhadap laju konversi lahan.

b. Faktor Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terkait faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat pemilik lahan untuk mengkonversikan lahannya adalah karena kondisi ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa responden menyatakan setuju dengan kondisi ekonomi yang mendorong konversi lahan dengan persentase sebesar 78% responden menyatakan setuju. Hal tersebut juga terbukti dari hasil uji chi-square untuk melihat pengaruh antara kondisi ekonomi masyarakat dengan konversi lahan yakni dengan angka 0,000 yang lebih kecil dari ($\alpha = 0,005$).

2. Faktor Eksternal

a. Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat mengenai kebijakan penataan ruang dan wilayah, skor yang didapat yakni sebesar 151 dengan persentase 75,5% responden menyatakan lemahnya pengawasan menjadi faktor pendorong terkait masalah konversi lahan yang ada di Desa Banyukuning. Dengan persentase 72,5 % masyarakat menyatakan bahwa terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dianggap karna pengawasan dari pemerintah yang lemah dimana masyarakat masih sering melakukan perubahan fungsi lahan secara sepihak tanpa takut untuk terdeteksi oleh pemerintah.

b. Pembangunan Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh pembangunan desa terhadap konversi lahan di Desa Banyukuning diperoleh hasil 157 dengan persentase 78,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan lahan untuk pembangunan Desa Banyukuning sangat berpengaruh akan konversi lahan pertanian untuk membangun sarana dan pra sarana desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Hampir seluruh responden menyatakan bahwa terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi adalah untuk melakukan pembangunan desa di sektor non-pertanian seperti sarana dan prasarana desa. Dari persentase responden sebesar 82,5% menyetujui bahwa alih fungsi lahan yang terjadi dilakukan guna mendukung proses pembangunan sarana dan prasarana desa Banyukuning.

3. Dampak Konversi Lahan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh konversi lahan terhadap kesejahteraan petani di Desa Banyukuning diperoleh hasil dengan total skor 139 dengan persentase 69,5 % sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat setuju dengan adanya pengaruh dari konversi lahan pertanian terhadap tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari menurunnya pendapatan petani. Rincian dari hasil penelitian yakni sebanyak 2 responden menyatakan sangat setuju, 24 responden menyatakan setuju, 5 responden menyatakan netral serta 9 responden menyatakan tidak setuju.

Selanjutnya peneliti melakukan uji chi square untuk melihat apakah ada hubungan antara pekerjaan responden dengan dampak yang dialami responden terkait pendapatan yang menurun. Dari hasil uji chi square di dapatkan hasil 0,001 yang artinya lebih kecil dari ($\alpha = 0,005$) maka dapat disimpulkan bahwa ada kaitan antara pekerjaan responden yang mengalami alih fungsi lahan dengan menurunnya pendapatan mereka. Dari hasil descriptive didapat bahwa 10 buruh tani dan 8 petani yang menyatakan setuju dengan menurunnya pendapatan petani yang dipengaruhi dari konversi lahan yang terjadi di Desa Banyukuning.

D. Penutup

Dari hasil penelitian terkait implementasi Perda RTRW terdapat beberapa masalah utama yang menghambat proses implementasi antara lain Sumber Daya Manusia yang kurang memadai untuk melakukan pemetaan pemanfaatan lahan. Dari minimnya SDM

yang memadai mengakibatkan pemetaan pemanfaatan ruang dan wilayah kurang efektif sehingga banyak lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk sektor non-pertanian sehingga lahan yang tersedia tidak dapat bernilai guna baik dalam mendukung pendapatan daerah yang mendukung untuk melakukan pembangunan di sektor lainnya. Masalah tersebut terjadi karna kebanyakan investor yang ingin menginvestasikan modal di Daerah tertentu terhambat karna lahan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diharapkan dari investor tersebut sehingga pemasukan bagi pemerintah guna mendanai urusan pembangunan terhambat masalah keterbatasan anggaran.

Selain masalah diatas, masalah yang terjadi dilapangan adalah pemanfaatan lahan secara sepihak oleh pemilik lahan yang tidak memperhatikan regulasi tentang pengelolaan kawasan daerah Provinsi Jawa Tengah. Masalah yang timbul karna lemahnya regulasi yang ada dapat memicu pelanggaran yang sulit dicegah karna pemilik lahan menganggap regulasi yang ada tidak terlalu memberatkan atau bahkan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya larangan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kebijakan. Selain itu juga memang pengawasan dari pihak pemerintah yang kurang sehingga pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kebijakan tidak terdeteksi secara dini yang menyebabkan laju konversi lahan semakin tinggi. Pemanfaatan lahan pertanian yang dikonversi menjadi non-pertanian oleh pemilik lahan disebabkan karna dorongan ekonomi yang mendorong pemilik lahan untuk dapat memanfaatkan sektor non-pertanian sebagai sumber pendapatan alternative yang dianggap dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

E. Daftar Pustaka

BUKU

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik “Edisi 2”. Salemba Humanika, Jakarta.
- Setyadi, Iwan Tritenty. 2005. Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi. 2008. Teori dan Proses Kebijakan Publik. MedPress. Yogyakarta
- Sugiyono. 2008. “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R &D*”. Bandung: Alfabeta

Creswell. John. W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Belajar.

DATA SEKUNDER

BPS Provinsi Jawa Tengah

Data Strategis Kabupaten Bandungan Tahun 2015

Kecamatan Bandungan Dalam Angka Tahun 2012 - 2015